



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 22 Januari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Lanjutkan Normalisasi dan Penertiban Bangli di Atas Kali

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo bertekad untuk mengatasi banjir yang kerap melanda. Plt Bupati Subandi, mengungkapkan komitmennya untuk terus melanjutkan program normalisasi sungai. Salah satu langkah yang diambil adalah jihad bersih-bersih sungai yang rutin dilakukan setiap Jumat.

Pada saat audiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Subandi menegaskan bahwa normalisasi sungai akan tetap berjalan. "Kegiatan gotong royong bersih-bersih juga tetap akan kami lakukan. Ini semua sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir," ujar Subandi.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar (bangli) yang berada di sepanjang aliran sun-

parah setiap tahunnya," tambah Subandi.

Ia menargetkan, revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Tambaksawah. Dengan penataan sungai yang lebih baik. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap. "Ini adalah tantangan besar, tetapi saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita bisa menurunkan risiko banjir," ungkapnya optimis.

Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan



PENHORMATAN: Plt Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo melakukan ziarah ke makam para mantan bupati Sidoarjo.

Memperingati Harjasda ke-166, Ziarah ke Makam Mantan Bupati



Kasus PMK Melonjak, Penjualan Daging Sapi di Pasar Porong Menurun

PORONG. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebar di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, mengakibatkan penjualan daging sapi di Pasar Baru Porong mengalami penurunan drastis. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada volume penjualan tetapi juga pada harga daging sapi. Maklumlah, masyarakat khawatir mengonsumsi daging sapi yang terdapat virus PMK. Akibatnya, pembeli cenderung memilih daging sapi yang sudah dimasak atau dimasak di rumah. "Sejak wabah PMK ramai diperbanyakan, penjualan saya menurun drastis. Biasanya saya bisa menjual hingga 70 kilogram daging per hari," kata Makmud, Selasa (21/1). Makmud menambahkan bahwa sebelum wabah PMK merambat, penjualannya bahkan bisa mencapai 90 kilogram daging sapi per hari saat ramai pembeli. Kini, jumlah tersebut menurun signifikan, hanya mampu menjual maksimal 60 kilogram daging per hari.

Pemkab Sidoarjo Tegaskan akan Normalisasi Sungai

Sidoarjo - HARIAN BANGSA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmen untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah terkait dengan memperbanyak kegiatan normalisasi sungai. Delaksana Tugas (DTG) Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan salah satu langkah yang diambil adalah melalui kegiatan bersih-bersih sungai akan terus dilakukan setiap Jumat di seluruh wilayah Sidoarjo. "Kegiatan gotong royong bersih-bersih sungai akan terus kami lakukan sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir," ujar Subandi dalam pertemuan dengan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo, Selasa (21/1). "Kita juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar yang berada di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, bangunan liar ini dinilai bisa menghambat akses alat berat yang diperlukan untuk normalisasi sungai. Subandi menilai jika tidak segera diantisipasi, bangunan liar ini bisa mengganggu normalisasi sungai sehingga dampak banjir beresiko semakin parah setiap tahunnya. Ia menargetkan revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Kecamatan Waru yang menjadi wilayah dengan dampak banjir yang cukup parah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan penataan sungai yang lebih baik, Subandi berharap dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap. "Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita bisa menurunkan risiko banjir," kata Subandi.



Plt Bupati Sidoarjo Subandi (tengah bala abu-abu) saat audiensi bersama Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi (tengah bala putih) mengenai normalisasi sungai di Sidoarjo, Selasa (21/1/2025). Sementara itu Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo untuk revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar. Saat ini terdapat 65 bangunan liar yang telah teridentifikasi di sekitar aliran sungai," kata Hendra. Pihak BBWS Brantas juga menyoroti pentingnya mengatasi kendala aksesibilitas di beberapa titik sungai akibat adanya bangunan liar. Hendra mengungkap beberapa titik sungai pihaknya kesulitan untuk mengerjakan alat berat karena akses yang terhalang oleh bangunan yang didirikan masyarakat. "Ini menjadi masalah revitalisasi sungai," kata Hendra. Dalam waktu dekat, BBWS Brantas akan fokus menganggotai wilayah Desa Pongel yang beberapa hari lalu sempat mengalami genangan banjir yang cukup parah. Rencana penuruan alat berat untuk mempermudah normalisasi sungai akan segera dilakukan meskipun tantangan aksesibilitas masih menjadi perhatian utama. Dengan adanya sinergi antara Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan banjir di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. (Antorus)

Bimbingan Teknis Pengendalian Kependudukan Masyarakat Dinas PPPA Dan KB Dengan Media Kabupaten Sidoarjo

Nawil, M. Suud - Rabu, 22 Januari 2025 | 06:19 WIB



Lanjutkan Normalisasi dan Penertiban Bangli di Atas Kali

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo berkekat untuk mengatasi banjir yang kerap melanda. Plt Bupati Subandi, mengungkapkan komitmennya untuk terus melanjutkan program normalisasi sungai. Salah satu langkah yang diambil adalah jihad bersih-bersih sungai yang rutin dilakukan setiap Jumat.

Pada saat audiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Subandi menegaskan bahwa normalisasi sungai akan tetap berjalan. "Kegiatan gotong royong bersih-bersih juga tetap akan kami lakukan. Ini semua sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir," ujar Subandi.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar (bangli) yang berada di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, bangunan liar yang menghalangi akses aliran sungai merupakan penyebab utama terjadinya banjir. "Jika tidak segera ditangani, banjir akan semakin

parah setiap tahunnya," tambah Subandi.

Ia menargetkan, revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Tambaksawah. Dengan penataan sungai yang lebih baik. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap. "Ini adalah tantangan besar, tetapi saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita bisa menurunkan risiko banjir," ungkapnya optimis.

Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo untuk menangani revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar. "Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang telah



Plt Bupati Sidoarjo Subandi ketika audiensi dengan BBWS Brantas di Pendopo Delta Wibawa.

teridentifikasi di sekitar aliran sungai," kata Hendra.

Dengan adanya sinergi itu,

diharapkan upaya penanganan banjir berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka pan-

jang untuk masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. (kri/jok/epe)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Cegah Banjir, Pemkab dan BBWS Brantas Fokus Revitalisasi Sungai

Masalah banjir di Sidoarjo menjadi perhatian utama dalam beberapa minggu terakhir.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas melakukan koordinasi dan kerja sama intensif.

M Saiful Rohman,
Wartawan Radar Sidoarjo

KEPALA BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air. "Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang telah teridentifikasi di sekitar aliran sungai," ungkapnya saat ditemui oleh Radar Sidoarjo pada Selasa (21/1).

Dalam waktu dekat, BBWS akan menengahi wilayah Pelelegi yang beberapa waktu lalu mengalami banjir cukup parah. Rencana tersebut



KERJA SAMA: Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat bertemu dengan Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi.

akan mencakup penurusan alat berat untuk mempercepat proses normalisasi sungai. Namun, ia menyoroti kendala

aksesibilitas di beberapa titik akibat adanya bangunan liar.

"Beberapa titik sungai sulit di-

jangkau alat berat karena aksesnya terhalang bangunan liar. Ini menjadi kendala mendasar yang harus segera ditangani," jelasnya.

Hendra menambahkan bahwa setelah penertiban bangunan liar, aliran sungai diharapkan kembali lancar sehingga risiko banjir dapat diminimalkan.

Terkait rencana pembangunan embung, BBWS Brantas masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat karakteristik geografis Kota Delta yang banyak terdiri dari daerah tambak.

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program normalisasi sungai.

Ia juga menegaskan pentingnya kegiatan bersih-bersih sungai yang rutin dilakukan setiap Jumat sebagai bagian dari mitigasi banjir.

• Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Cegah Banjir...

Normalisasi sungai akan terus berlanjut, begitu juga dengan groyong di sungai, tuturnya.
Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan di sepanjang ali-

ran sungai sangat penting agar alat berat dapat mengakses area yang seluas mungkin.
"Jika masalah ini tidak segera ditangani, banjir akan semakin parah setiap tahunnya," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menghadapi tan-

tangan ini demi mengurangi dampak banjir di masa mendatang. Subandi menekankan revitalisasi sungai dari hulu hingga telukbaksawan.
"Dengan penataan yang baik, kita

harapkan risiko banjir dapat diminimalkan," tuturnya.
Subandi menekankan bahwa meskipun tantangan ini besar, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam

mengatasi masalah lingkungan di Sidoarjo.
"Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan sinergi, saya yakin kita bisa menurunkan risiko banjir secara bertahap," tutupnya. (sai/vga)

Calvin Darmawan

media ini bebas

kegiatan ini



Kasus PMK Melonjak, Penjualan Daging Sapi di Pasar Porong Menurun

PORONG-Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, mengakibatkan penjualan daging sapi di Pasar Baru Porong mengalami penurunan drastis.

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada volume penjualan tetapi juga pada harga daging sapi. Pedagang mengaku kesulitan menghadapi situasi ini, seperti yang disampaikan oleh Mahmudah, salah seorang pedagang daging di pasar tersebut.

"Sejak wabah PMK ramai diperbincangkan, penjualan saya menurun drastis. Biasanya saya bisa menjual hingga 70 kilogram daging per hari," kata Mahmudah, Selasa (21/1).

Mahmudah mengungkapkan bahwa sebelum wabah PMK merbak, penjualannya bahkan bisa mencapai 95 kilogram daging sapi per hari saat ramai pembeli. Kini, jumlah tersebut menurun signifikan, hanya mampu menjual maksimal 60 kilogram daging per hari.

CS Dipindai dengan CamScanner

SEPI: Pedagang daging sapi di Pasar Porong ikut waswas dengan merebaknya PMK.



Kasus PMK Melonjak...

"Wabah PMK ini sangat merugikan, baik bagi peternak maupun pedagang. Bahkan, penjualan saat akhir pekan sekarang hanya mencapai 50 kilogram saja," tuturnya.

Sebelum merebaknya wabah PMK, harga daging sapi di Pasar Baru Porong berada di kisaran Rp 110 ribu per kilogram. Namun, saat ini harga turun menjadi Rp 105 ribu per kilogram. Sayangnya, meskipun harga sudah diturunkan, minat pembeli

tetap menurun.

Hal serupa diungkapkan oleh Mahfud, pedagang daging sapi lainnya di pasar tersebut. Ia mengaku penjualannya turun drastis sejak kasus PMK meluas.

"Dulu saya bisa menjual 75 hingga

95 kilogram per hari. Sekarang, meskipun harga sudah turun, penjualan hanya sekitar 65 kilogram pada hari biasa," ungkap Mahfud.

Ia menambahkan, pada akhir pekan sebelum wabah PMK, penjualannya bisa mencapai satu kuintal daging sapi.

Namun, saat ini, jumlah tersebut berkurang drastis menjadi maksimal 75 kilogram, bahkan pada akhir pekan.

"Rata-rata pembeli saya adalah pelanggan tetap. Tapi dengan situasi seperti ini, mereka juga lebih berhati-hati," pungkasnya. (dik/vga)



PENHORMATAN: Plt Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo melakukan ziarah ke makam para mantan bupati Sidoarjo.

Memperingati Harjasda ke-166, Ziarah ke Makam Mantan Bupati

KOTA-Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-166 tahun 2025, Plt Bupati Sidoarjo Subandi, bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo, melakukan ziarah ke makam para mantan bupati Sidoarjo. Kegiatan ini diawali dengan apel kehormatan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sidoarjo pada Selasa (21/1).

Apel kehormatan tersebut dipimpin langsung oleh Subandi dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam Bupati Sidoarjo ke-10, R. Suriadi Kertosuprojo, yang dimakamkan di TMP Sidoarjo. Doa bersama dipanjatkan untuk mengenang jasa beliau yang pernah memimpin Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1950 hingga 1958.

Setelah dari TMP Sidoarjo, rombongan ziarah dibagi menjadi enam tim untuk mengunjungi berbagai makam mantan

bupati Sidoarjo yang tersebar di beberapa lokasi.

Tim pertama, dipimpin oleh Subandi, mengunjungi makam Bupati Sidoarjo pertama, RT. Notopuro, yang bergelar RTP. Tjokronegoro I, di Makam Asri Ing Pendhem. Ziarah dilanjutkan ke makam Bupati Sidoarjo ke-3, R.P. Sumodiredjo, yang juga dimakamkan di lokasi yang sama, di belakang Masjid Agung Sidoarjo.

Kemudian, rombongan melanjutkan ziarah ke Makam Tjondronegoro, tempat peristirahatan Bupati Sidoarjo ke-5 R.A.A.P. Tjondronegoro I, Bupati Sidoarjo ke-6 R.A.A. Tjondronegoro II, dan Bupati Sidoarjo ke-8 R.A.A. Soejadi. Selanjutnya, rombongan menuju Makam Rekso Praloyo, yang berdekatan dengan Asri Ing Pendhem, untuk berziarah ke makam Bupati Sidoarjo ke-15, Kolonel Polisi H. Soewandi.

Tim kedua berziarah ke TMF Suropati di Malang, tempat dimakamkannya Bupati Sidoarjo ke-14, Brigjen Pol. Purn. H.R. Soedarsono, yang wafat pada 4 November 2008.

Tim ketiga menuju Dusun Pandan, Mojosari, Mojokerto untuk berziarah ke makam Bupati Sidoarjo ke-13, R.H. Samadi koen, yang memimpin pada tahun 1959 hingga 1964. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Jombang untuk berziarah ke makam Bupati Sidoarjo ke-7 R.T.A. Soemodipoetro.

Tim keempat mengunjungi Makam Islam Jetis di Sidoarjo, tempat dimakamkannya Bupati Sidoarjo ke-12, H. A. Chudlor: Amir, yang wafat pada tahun 2002. Ziarah dilanjutkan ke makam mantan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2016-2021, H. Nur Ahmad Syaifuddin, di Desa Janti, Kecamatan Waru. (sai/vga)

Pemkab Sidoarjo Tegaskan akan Normalisasi Sungai

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmen untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah terkait dengan memperbanyak kegiatan normalisasi sungai.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan salah satu langkah yang diambil adalah melalui kegiatan bersih-bersih sungai yang rutin dilakukan setiap Jumat di seluruh wilayah Sidoarjo.

"Kegiatan gotong royong bersih-bersih sungai akan terus kami lakukan sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir," ujar Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Selasa (21/1/2025).
Subandi juga menegaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar yang

berada di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, bangunan liar ini dinilai bisa menghambat akses alat berat yang diperlukan untuk normalisasi sungai.

Subandi menilai jika tidak segera ditangani, bangunan liar ini bisa mengganggu normalisasi sungai sehingga dampak banjir beresiko semakin parah setiap tahunnya.

Ia menargetkan revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Kecamatan Sepanjang hingga Kecamatan Waru yang menjadi wilayah dengan dampak banjir yang cukup parah dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan penataan sungai yang lebih baik, Subandi berharap dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap. "Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bisa bersama-sama menurunkan risiko banjir," kata Subandi.



Plt Bupati Sidoarjo Subandi (tengah baju abu-abu) saat audiensi bersama Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi (tengah baju putih) mengenai normalisasi sungai di Sidoarjo, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo untuk menargetkan revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar. "Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang tel-

ah teridentifikasi di sekitar aliran sungai," kata Hendra.

Pihak BBWS Brantas juga menyoroti pentingnya mengatasi kendala aksesibilitas di beberapa titik sungai akibat adanya bangunan liar. Hendra mengaku di beberapa titik sungai pihaknya kesulitan

untuk mengerahkan alat berat karena akses yang terhalang oleh bangunan yang didirikan masyarakat. "Ini menjadi masalah mendasar yang mengganggu revitalisasi sungai," kata Hendra.

Dalam waktu dekat, BBWS Brantas akan fokus menangani wilayah Desa Pepelegi yang beberapa hari lalu sempat mengalami genangan banjir yang cukup parah. Rencana penurunan alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akan segera dilakukan meskipun tantangan aksesibilitas masih menjadi perhatian utama.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan banjir di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. (ant/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga, Jatim

Pembelajaran di Bulan Ramadan Diatur Edaran Bersama Tiga Menteri

Kedepankan Nilai Ketakwaan

JAKARTA - Pemerintah bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan, pada Bulan Ramadan umat Islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti tadarus Alquran, salat tarawih, bersedekah dan kajian agama. Oleh karena itu, pemerintah meminta penting untuk tetap dilaksanakan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dan memenuhi capaian



MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

keagamaan.

Selain kegiatan pembelajaran, selama

pembelajaran. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki tradisi mudik dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan.

Menyikapi situasi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/LS/2025 Isj Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Adapun regulasi itu akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan. Pada saat yang sama, Setelah bulan Ramadan berakhir, pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan ibadah Idulfitri dan merayakan bersama keluarga dan masyarakat.

“Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Isi Surat Edaran Bersama Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah 12025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan diatur sebagai berikut. Pertama, tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan. Kedua, tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan

bulan Ramadan diharapkan peserta didik melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Sementara itu, bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.

Adapun tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025. “Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan,” ujar Menteri Mu`ti.

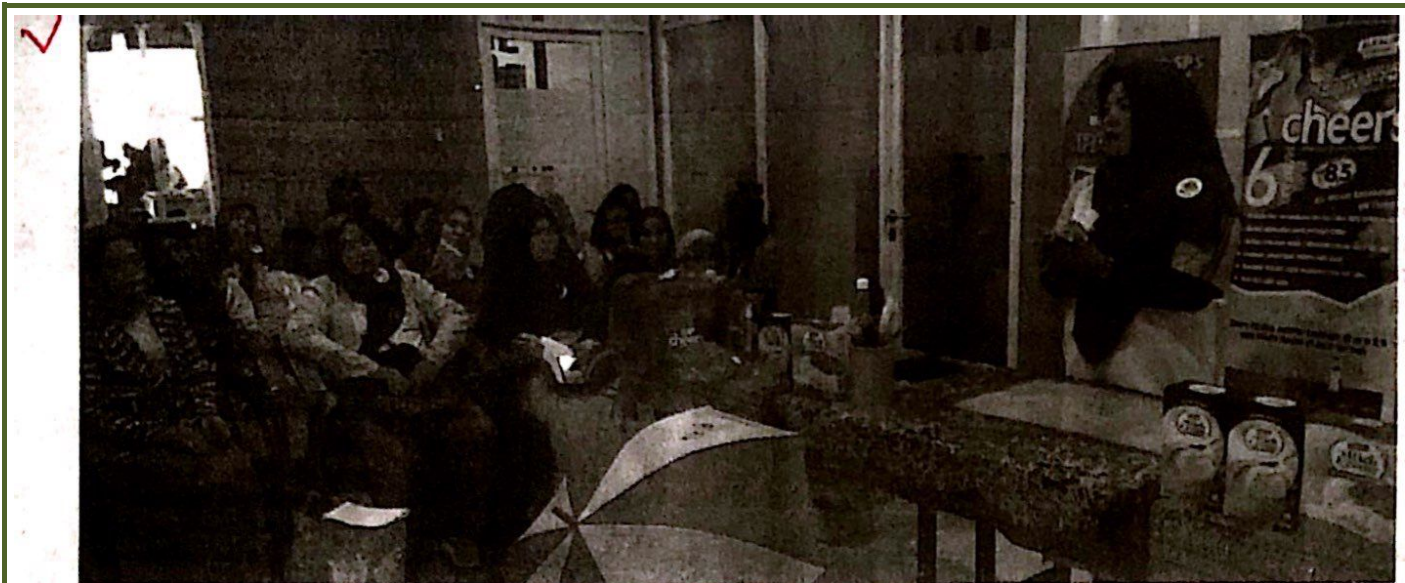
Regulasi ini juga mengatur peran pemerintah daerah yaitu 1) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh sekolah; dan 2) menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan.

Sementara itu, peran kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yaitu 1) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani madrasah/satuan pendidikan keagamaan, dan 2) menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan. Sedangkan, peran orang tua/wali adalah membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah serta memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri. ● ril/kem



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOETTV/DUTA

Baking Demo HKTI Sidoarjo gandeng Rich Vreme dan Rumah BUMN BRI, Selasa (21/1/25)

UMKM HKTI Baking Demo Bangun Jaringan dan Kreativitas Produk

SIDOARJO - Bertempat di Rumah BUMN BRI Sidoarjo, di jalan Jaksa Agung Supratman Selasa (21/1/25), kegiatan positif "Baking Demo" digelar oleh HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Sidoarjo untuk mempererat jaringan antar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan juga dalam rangka evaluasi anggota tiap enam bulan sekali guna memberikan masukan - masukan dan harapan dalam program kedepan.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 60 peserta ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para anggota untuk berbagi masukan serta harapan terkait program-program yang akan datang.

Bintang Bagus Hermawan, Technical Chef PT Lautan Natural yang dihadirkan dalam kegiatan, mengungkapkan harapannya agar UMKM di Sidoarjo dapat terus berkembang di tahun 2025, menghadapi berbagai tantangan, serta dapat bersinergi dengan BUMN dan pihak-pihak terkait.

"Semoga kedepannya bisa lebih maju, dan dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada, serta bisa bersinergi dengan BUMN dan pihak-pihak terkait dan selain HKTI," ujar Bintang.

Hal yang diungkapkan adalah bahwa ini ada dua menu yang diper-

kenalkan, yaitu pembuatan kue Cinnamon roll dan minuman racikan The Blue Ocean dengan bahan utama berupa air dan bubuk kayu manis.

Sementara Prestalia, yang akrab disapa Dokter Etak Ketua Pereimpuan Tani HKTI Sidoarjo mengatakan, "kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok UMKM di Sidoarjo agar bisa saling berkomunikasi dan membangun jaringan. Di harapkan, dengan adanya kegiatan ini, akan terbentuk iklim bisnis yang positif dan menguntungkan bagi semua pelaku usaha (profit).

Ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan bisa lebih kreatif dan inovatif, mengingat banyaknya pesaing di pasar saat ini. Sedikitnya 60 undangan yang mengikuti kegiatan ini. Yang mana kita hidup di zona yang harus kreatif dimana yang dinaungi oleh UMKM HKTI Sidoarjo yang diketuai oleh Mbak Endang," pungkaskan dokter Etak.

Terpisah Endang Prasetyowati, Ketua UMKM HKTI Sidoarjo, mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan setiap enam bulan sekali.

"Kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada anggota

untuk memberikan masukan dan harapan untuk program ke depan," jelas Endang.

Ia berharap agar produk-produk UMKM tidak hanya dikenal di Sidoarjo, tetapi juga bisa dikenal lebih luas lagi. "Harapan saya adalah agar para anggota UMKM ini bisa memperkenalkan produk mereka ke khalayak luas dan saling mengenal produk teman-teman yang lain," tambahnya.

"Kegiatan ini menunjukkan semangat positif untuk membangun UMKM di Sidoarjo agar semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," pungkaskan.

Salah satu sponsor yang ikut mensupport, Haryanto Setiawan Wiyoto, National Marketing Manager mengatakan, jadi ini salah satu kegiatan bagus, yang dilakukan HKTI Sidoarjo secara rutin dengan menggelar kegiatan baking demo. Dengan menggandeng rekanan sponsor termasuk cheers,

"Harapannya bisa memberikan edukasi training maupun workshop bagi para UMKM. Karena mereka ini kadang - kadang punya potensi, tetapi belum tahu bagaimana cara mempromosikannya. Dan cheers berharap bisa terus mensupport untuk air minumannya, begitu juga UMKM," terang Haryanto. ●Loe

DUTA

Tangani Banjir Sidoarjo

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen serius dalam mengatasi permasalahan banjir yang sering melanda wilayah tersebut. Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan tekadnya untuk melanjutkan program normalisasi sungai yang telah dimulai beberapa waktu lalu, guna mengurangi risiko banjir di masa depan.

Dalam audiensi yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, Subandi menekankan bahwa normalisasi sungai dan kegiatan gotong royong bersih-bersih sungai akan tetap dilanjutkan setiap Jumat sebagai langkah mitigasi banjir.

"Kegiatan gotong royong bersih-bersih juga tetap akan kami lakukan. Ini semua sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir," ujar Subandi, Selasa (21/1/25).

Selain itu, Subandi juga menekankan pentingnya pencerdasan bangunan liar (bangli) yang ada di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, keberadaan bangunan liar

ini menghambat akses alat berat yang diperlukan untuk normalisasi sungai. "Jika tidak segera ditangani, banjir akan semakin parah setiap tahunnya," tambah Subandi.

Target revitalisasi sungai mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Tambaksawah. Dengan penataan sungai yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap. Subandi optimis, dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, tantangan besar ini bisa diatasi.

Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo terkait revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar. "Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang telah teridentifikasi di sekitar aliran sungai," kata Hendra.

Hendra juga mengungkapkan bahwa kendala aksesibilitas di beberapa titik sungai akibat bangunan liar menjadi masalah utama dalam revitalisasi. "Beberapa titik sungai bahkan susah untuk diturunkan



Pemkab Sidoarjo audiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo

alat berat karena aksesnya terhalang bangunan," ujar Hendra.

BBWS Brantas akan fokus menangani wilayah Pepelegi, yang beberapa tahun terakhir mengalami penangan banjir parah. Rencana penertiban alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akan segera dilakukan meskipun masalah aksesibilitas masih

menjadi perhatian utama.

Terkait pembangunan embung sebagai solusi banjir, Hendra menyebutkan bahwa kajian lebih lanjut diperlukan mengingat kondisi geografis Sidoarjo yang memiliki banyak tambak. Meskipun begitu, langkah-langkah mitigasi lainnya akan terus dilakukan untuk mengu-

rangi dampak banjir di daerah ini.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di Sidoarjo. • Loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PUTUSAN INKRACHT: Aksi massa mengiringi eksekusi PN Sidoarjo di lahan tambak Desa Segoro Tambak kemarin (21/1).

PN Eksekusi Lahan Tambak 27.803 Meter Persegi

SIDOARJO – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo melaksanakan eksekusi atas lahan tambak di Desa Segoro Tambak kemarin (21/1). Eksekusi dilakukan setelah putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 432 PK/PDT/2024 berkekuatan hukum tetap.

Panitera PN Sidoarjo Rudy Hartono mengatakan, pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan PK yang sudah *inkracht* dan bersifat meng-hukum. "Eksekusi dilakukan sesuai dengan penetapan dan amar putusan," jelasnya.

kum hingga tingkat PK, MA menyatakan bahwa lahan yang disengketakan sah dimiliki PT Sunindo Primaland.

Rudy memastikan titik eksekusi sesuai dengan amar putusan. Lokasi berada di Desa Segoro Tambak, bukan Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, seperti yang sebelumnya dipersoalkan pihak termohon. "Kami sudah melakukan koordinasi dan verifikasi. Lokasi eksekusi memang benar berada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, tegasnya.

Lahan yang sebelumnya

Perkara tersebut melibatkan PT Sunindo Primaland sebagai pemohon melawan Hindun Solikhan dan kawan-kawan sebagai termohon. Setelah melalui tahapan hu-

milik termohon kini resmi diserahkan kepada PT Sunindo Primaland sebagai pemilik yang sah. Luas lahan yang dieksekusi sekitar 27.803 meter persegi. (eza/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Penghormatan untuk Pendahulu

PLT Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kiri) meletakkan bunga di makam mantan Bupati RT Soemodirdjo di Makam Keluarga Asri Ing Pendhem, Magersari, kemarin (21/1). Menjelang Hari Jadi Ke-166 Kabupaten Sidoarjo, Subandi bersama jajaran forkopimda berziarah ke makam para bupati terdahulu sebagai bentuk penghormatan. (uzi/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BBWS Brantas Identifikasi Empat Penyebab Banjir

Bersama Pemkab Sepakati
Percepatan Penanganan

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sepakat untuk mempercepat langkah penanganan banjir. Setidaknya ada empat permasalahan yang telah dipetakan.

Dalam pertemuan di Pendopo Delta Wibawa kemarin (21/1), Plt Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk penanganan permasalahan banjir,

terutama sejak akhir 2024. Salah satunya, kegiatan gotong royong membersihkan sungai secara rutin setiap Jumat dan Minggu.

"Kami juga melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang bangunannya berdiri di atas sungai. Selain itu, kami terus memantau kondisi sungai dari udara untuk memastikan tidak ada aliran yang terhambat oleh enceng gondok," ungkap Subandi.

Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi menegaskan bahwa pihaknya berharap dukungan Pemkab Sidoarjo untuk memper-



BUANG ENCENG GONDOK: Normalisasi Sungai Cantel di Desa Tambaksawah terus berlangsung hingga kemarin (21/1).

nergi antara BBWS dan pemda. "Kami berencana memulai penanganan dari hulu sungai dan berharap dukungan Pemkab Sidoarjo untuk memper-

mudah implementasi program," ujarnya.

BBWS Brantas mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab

banjir. Pertama, di *afvoer* Bunting. Permasalahannya adalah kapasitas saluran tidak memadai sehingga air meluap ke jalan. Juga ada penyempitan aliran akibat bangunan liar.

Kedua, pada sistem *afvoer* Paketingan ada penyempitan aliran di bawah jembatan. Ketiga, sistem *afvoer* Aloo. Tanah di permukiman sekitar *afvoer* Aloo lebih rendah dari drainase sehingga air menggenang.

Ke empat, di Kali Porong. Ada sedimentasi sungai dan beberapa titik ada penyempitan. Solusinya, lewat program Delta Brantas Flood Control. (uzi/fal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bimbingan Teknis Pengendalian Kependudukan Masyarakat Dinas PPPA Dan KB Dengan Media Kabupaten Sidoarjo

Nawi, M. Suud - Rabu, 22 Januari 2025 | 06:19 WIB



Sidoarjo Nawacitapost - Dengan suasana yang indah dan bahagia ini penyelenggara bimbingan teknis kependudukan dan pengendalian penduduk Dinas PPPA Dan KB hal ini mempunyai dua tugas antarlain urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan keluarga berencana.

Sementara Heni Kridtiani S. pd. M M Menyampaikan apa sudah dikenalkan namanya KB Mungkin ada yang sudah kenal itulah tugas kami, kemudian jika kita bicara dengan teknis pengendalian penduduk banyak hal yang di harus di ketahui pertama terkait dengan status kelahiran anak itu tahun 2002 persalinannya 15,2% kemudian di 2023 itu menjadi 8,4% hal ini sesuai dengan tupoksi kami intervensi dan sampai yang kami lakukan yaitu perubahan perilaku terhadap masyarakat.

apa saja yang sudah kami lakukan yang pertama kami sosialisasi terhadap masyarakat dengan program kami yang namanya sekolah orang tua dan setiap kali setelah selesai kegiatan sekolah ini para pemuda terdiri dari ayah dan ibu yang di mana di situ untuk membuat perilaku baik yang mempunyai anak balita.

Mungkin juga dapat informasi tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil tanpa ada dukungan dari lingkungan yang ada," Bilangnya Heni kridtiani.

Masih kata Heni, Kabupaten Sidoarjo yaitu terkait dengan pernikahan di bawah usia 19 tahun menurut undang-undang Sementara masih banyak perempuan di sini kawin di bawa umur sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih terus meningkat karena itu perlu adanya konsentrasi yang peduli terhadap perempuan dan anak.

"Saya memohon kepada semua teman teman media untuk ikut membantu apa bila ada hal seperti ini, pasti mirip bahwa apa yang terjadi terkait dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak."



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jadi itu yang sering kita temui di sini kami juga sosial ini mulai dari keluarga terkecil dan saya juga punya yang nama program keluarga berencana dan perlindungan kekerasan perempuan dan setangtin.

kalau terkait dengan kekerasan kami ada yang namanya bidang perlindungan perempuan dan anak jadi semua itu saling berkaitan karena di sidoarjo program ini dapat dikatakan berhasil apa artinya disisi lain bahwa setiap keluarga itu mempunyai masalah, kami siap menangani dan membantu membangun keluarga tersebut untuk menjadi baik juga terkait dengan anak anak balita." Pungkasnya (**/ud)



Dishub Sidoarjo Ingin Ambil Parkir dari PT ISS, Hakim: Silakan Berunding Lagi

Editor: Fathur Roziq

21 Januari 2025 13:17



Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga (kiri) berbincang dengan pengacara negara dari Kekaksanaan Negeri Sidoarjo se usai persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Selasa (21 Januari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)



KETIK, SIDOARJO – Persidangan sengketa pengelolaan parkir antara Dishub Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis (PT ISS) masih bergulir di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sambil menunggu putusan hakim, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo berharap PT ISS mau menyerahkan pengelolaan parkir ke Pemkab Sidoarjo. Terhitung sejak Januari 2025.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga kepada majelis hakim PN Sidoarjo pada Selasa (21 Januari 2025). Benny punya argumentasi.

Hingga saat ini, PT ISS-KSO belum menyetorkan pendapatan hasil kerja sama. Selama Januari hingga Desember 2024, nilainya mencapai Rp 7,1 miliar. Dia khawatir. Sebab, jadwal persidangan di PN Sidoarjo direncanakan berlangsung hingga Mei 2025. Ada waktu 5 bulan masa sengketa disidangkan.

"Karena yang tahun 2024 saja belum dibayar. Kami berharap, yang sejak Januari 2025 diserahkan kepada kami," ungkap Benny kepada majelis hakim.

Dishub Sidoarjo, lanjut Benny, ingin tunggakan tahun 2024 itu dibayar. Kontrak putus. Lalu, pengelolaan dikembalikan ke Dishub Sidoarjo sejak 2025. Pertimbangannya, soal kepastian kewajiban pembayaran dari PT ISS. Kedua, terkait kondusivitas jukir-jukir di Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mendengar permohonan itu, majelis hakim menyarankan kemungkinan perdamaian di antara kedua belah pihak. Perdamaian masih terbuka sampai sebelum putusan. Persidangan perkara perdata parkir ini dijadwalkan berjalan hingga Mei 2025. Dari pembacaan dakwaan, putusan sela, saksi-saksi, bukti-bukti baik dari penggugat maupun tergugat, tambahan bukti, hingga kesimpulan. Perkiraan putusan dibacakan pada 13 Mei 2025. Kemungkinan perdamaian masih terbuka. Pihak Dishub Sidoarjo juga disarankan minta pendapat ke kejaksaan sebagai pengacara negara.



"Silakan dibicarakan dengan pengacara (PT ISS)," kata hakim S. Pardamean kepada pihak Dishub Sidoarjo.

Sementara itu, dipihak lain, pengacara PT ISS belum bersedia memberikan keterangan. Dia menyatakan hendak melaporkan dulu hasil persidangan kepada Direktur PT ISSi Dian Sucipto. (*)



BPN Jatim Sebut HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo Terbagi 3 Sertifikat

Reporter: Sujatmiko | Editor: Ferry Ardi Setiawan | Selasa 21-01-2025,20:18 WIB



Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri saat menyampaikan penjelasan tentang HGB seluas 656 hektare di laut Sidoarjo. -Sujatmiko-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim memberikan klarifikasi terkait temuan hak guna bangunan (HGB) di atas laut di Kabupaten Sidoarjo yang mencakup area sekitar 656 hektare. Lokasi tersebut diketahui terbagi dalam tiga sertifikat yang dimiliki oleh dua perusahaan berbeda.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Kepala Kanwil BPN Jatim, Lampri, mengonfirmasi bahwa lahan HGB tersebut terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan bukan di [Surabaya](#) seperti yang sempat diberitakan sebelumnya.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kalau kita membaca berita 1 hari lalu bahwa kita ada HGB di lokasi Surabaya, itu salah. Sesungguhnya HGB itu berada di Desa Segoro Tambak, Sedati, Kabupaten Sidoarjo," ujar Lampri dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor BPN Jatim, Selasa 21 Januari 2025.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Lampri juga menjelaskan bahwa HGB seluas 656 hektare tersebut terbagi ke dalam tiga sertifikat yang dimiliki oleh dua perusahaan. Meskipun begitu, Lampri belum bisa memastikan sektor usaha perusahaan tersebut, meskipun ada indikasi bahwa salah satu dari mereka bergerak dalam bidang perumahan.

"Kasarannya mungkin bidang perumahan. Tapi ini masih dalam tahap investigasi," lanjut Lampri.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Temuan HGB tersebut kali pertama mencuat di media sosial X (dulu Twitter) setelah akun @thanthowy membagikan informasi mengenai lokasi HGB yang ditemukan di atas laut antara Surabaya dan Sidoarjo. Lokasi tersebut berada tepat di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, dengan koordinat 1.7.342163°S, 112.844088°E.

Akun @thanthowy juga mencatat bahwa temuan HGB tersebut bisa bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013, yang melarang penggunaan ruang laut untuk hak guna bangunan. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur tahun 2023 terkait pengelolaan wilayah pesisir.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

"Putusan MK 85/PUU-XI/2013 melarang/membatalkan pemanfaatan ruang (HGB dan lain-lain) di atas perairan. Saya juga temukan inkonsistensi rencana pengelolaan tata ruang di RTRW Jatim 10 2023," ungkap @thanthowy.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kasus yang serupa juga muncul di Tangerang, yang menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran aturan tata ruang dan hukum lingkungan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kasus HGB di Sidoarjo juga akan menjadi perdebatan hukum yang melibatkan regulasi terkait penggunaan ruang di perairan. (mik)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR